

ABSTRAK

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Gorontalo Utara Dan untuk mengetahui program Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Gorontalo Utara dan apa Hambatannya

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis. Data kemudian dianalisis dengan keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang diteliti, dan mempelajari apa yang dinyatakan responden/informan baik secara lisan maupun tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Dinas Kelautan dan perikanan Kabuapten Gorontalo Utara adalah mewujudkan pelaksanaan program pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam budang usaha perikanan. Program Dinas Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara adalah Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai fungsi Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, Pelaksanaan evaluasi dan elaporan di bidang kelautan dan perikanan, Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Hambatannya adalah kurangnya kelengkapan alat-alat yang dipergunakan dalam pelaksanaan fungsi dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci : Otonomi daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Gorontalo Utara

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17,504 pulau-pulau besar dan kecil. Negara kepulauan atau yang negara maritim artinya di dalam negara tersebut memiliki luas wilayah perairan 3.257.483 km² dan luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.922,579km². **Hal ini menunjukkan bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Selain itu, letak Indonesia yang berada dalam posisi strategis yaitu di antara dua Benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta berada di antara dua Samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) membuat wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan bagus untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk mengetahui Program Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Hambatannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif.

Hasil Penilitan menunjukkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah mewujudkan pelaksanaan program pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam bidang usaha perikanan. Program kegiatan Dinas Perikanan dan program pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan dan daya pemasaran hasil perikanan, program kegiatan perikanan budidaya, sasaran pelaksanaan program kegiatan perikanan.

Kata Kunci : Konsep Desentralisasi dan Otonomi daerah, tinjauan tentang Otonomi daerah, peraturan menteri kelautan dan perikanan.

ABSTRACT

The granting of the broadest possible autonomy to the Regions is carried out based on the principle of a unitary state. In a unitary state sovereignty is only in the state government or national government and there is no sovereignty in the Region. Therefore, no matter how much autonomy is given to the Region, the final responsibility for the administration of the Regional Government will remain in the hands of the Central Government. For that Regional Government in the State. The importance of this research is to know the Implementation of the Functions of the Fisheries and Maritime Services in North Gorontalo District and to find out the Fisheries and Maritime Services program in North Gorontalo District and what are the obstacles.

The analytical method used is qualitative analysis, namely research that utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings, and behavior of individuals or groups of people. Primary data and secondary data that have been collected are then systematically compiled. The data is then analyzed with the existing circumstances and facts based on theories that are related to the problems studied, and learns what the respondent / informant states both verbally and in writing.

The results showed that the function of the Marine and Fisheries Office of North Gorontalo District was realizing the implementation of government programs or fisheries affairs in the processing of fisheries products owned by the region to support the implementation of regional autonomy in a broad, tangible and responsible manner as one of the potentials that could be developed by local governments in budang fishery business. North Gorontalo District Marine Service Program is North Gorontalo Regency Fisheries has the functions of the formulation of policies in the field of maritime affairs and fisheries, the implementation of policies in the field of marine and fisheries, the implementation of evaluation and reporting in the field of marine and fisheries. Other functions given by the Governor are related to their duties and functions. The obstacle is the lack of completeness of the tools used in the implementation of the functions and roles of the Department of Maritime Affairs and Fisheries in North Gorontalo District.

Keywords: Regional Autonomy, Maritime Affairs and Fisheries, North Gorontalo District